

cakrawala pemilu

Sumbu Informasi Pilkada 2024

Edisi 1/2024
jabar.kpu.go.id



PRUNG GEURA TARUNG

Liputan Khusus 4-9
Penuh Warna, Penuh Drama

Kabar KPU 10-13
Pilkada Riang Gembira

Intermezzo 20-21
Makna Sili dan Wangi

DAFTAR ISI



LAPORAN KHUSUS 4

PRUNG GEURA TARUNG

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 tinggal menghitung hari. Nomor urut masing-masing paslon tuntas ditetapkan. Prung Geura Tarung (Ayo Segera Bertarung).



KABAR KPU 10

PILKADA RIANG GEMBIRA

BUKAN perkara enteng mengelat Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat. Jumlah pemilihnya, terbanyak seantero negeri. 'Mari jadikan Pilkada Riang Gembira,' kata Ummu Wahyuni.



cakrawala pemilu

Sumbu Informasi Pilkada 2024

Warta Daerah 18
Melawan Kotak Kosong di Clamis

Intermezzo 20
Makna Sili dan Wangi

Edukasi 22
Mengikis Apatisme

Opini 23
Siliditas dan Sinergitas



SINERGITAS 14

KONTESTASI HEBAT ITU, SEMUA TERLIBAT

KALAU harus dipilih satu dari sekian banyak tolok ukur hebat atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, maka jawabannya: partisipasi.



PILKADA DAN IKHTIAR KITA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat khususnya pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Salah satunya melalui kontes Stand Up Comedy.

Selain menjadi ajang meningkatkan partisipasi masyarakat, kontes Stand Up Comedy ini juga menjadi salah satu media yang strategis untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Pilkada 2024 dengan cara yang berbeda.

Mengingat, data menunjukan lebih dari 50 persen masyarakat di Jabar adalah pemilih muda dan pemilih pemula. Karena itu, pendekatan atau pola komunikasi harus berbeda dengan generasi baby boomer atau generasi lainnya.

Bukan hanya di tingkat provinsi, kontes Stand Up Comedy juga rencananya bakal digelar di 27 kabupaten/kota di Jabar. Hal ini juga sebagai langkah ikhtiar untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Tak sampai disitu, upaya lain yang dilakukan KPU Jabar adalah dengan menyelenggarakan Kirab Pilkada yang berlangsung di 27 kabupaten/kota di Jabar.

Dalam Kirab Pilkada tersebut, juga akan diisi oleh berbagai kegiatan yang menarik minat masyarakat. Bahkan, kendaraan hias dengan pernik-pernik pilkada pun akan disiapkan.

Rencananya, Kirab Pilkada ini akan berlangsung selama dua hari di setiap kabupaten/kota di Jabar.

Dalam menyukseskan Pilkada 2024 ini sudah menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya KPU Jabar sebagai pihak penyelenggara. Media massa juga memiliki peran penting untuk menyukseskan pesta demokrasi ini.

Dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) media massa, mereka harus bisa memastikan bagaimana informasi yang berkaitan dengan pilkada ini bisa tersampaikan dengan baik

kepada masyarakat.

Dengan adanya peran media massa, KPU Jabar menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini meningkat 2 persen atau menjadi 75 persen dibanding tahun sebelumnya.

Disadari, capaian target tersebut bukanlah perkara yang mudah jika melihat realitas politik yang ada di Jabar saat ini. Meski begitu, dengan adanya peran dari multi pihak termasuk media massa, diyakini target tersebut bisa terealisasi.

Selain peran media massa, KPU Jabar juga gencar melakukan sosialisasi tatap muka bersama dengan semua organisasi yang ada di Jabar.

KPU Jabar juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih yang ditargetkan naik 2 persen dari Pilkada sebelumnya.

Selain meningkatkan partisipasi pemilih, mahasiswa khususnya para pemuda ini diharapkan menggunakan hak pilihnya dengan bijak dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November nanti.

KPU Jabar optimistis empat bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024 juga akan ikut membantu dalam menyosialisasikan Pilkada 2024.

Saat ini, keempat bakal paslon Cagub-Cawagub Jabar 2024 telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi. KPU Jabar pun telah menyampaikan hasil verifikasi ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar.

Selanjutnya, KPU Jabar akan mengumumkan hasil tersebut kepada publik agar bisa ditanggapi oleh masyarakat. Sebelum nantinya ditetapkan sebagai paslon sah Pilgub Jabar 2024.

Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar

PRUNG GEURA TARUNG!

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 tinggal menghitung hari. Nomor urut masing-masing paslon tuntas ditetapkan. Prung Geura Tarung (Ayo Segera Bertarung).

Di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin 23 September malam WIB, KPU Jabar menggelar pengundian nomor urut dalam rapat pleno terbuka dipimpin langsung sang ketua, Ummi Wahyuni dimulai sekitar pukul 20.10 WIB.

“Dengan mengucapkan bismillah rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 yang dilaksanakan Senin 23 September 2024 dengan ini resmi saya

buka,” ucap Ummi.

Pengundian nomor urut dihadiri oleh empat pasangan cagub dan cawagub Jabar 2024 serta pimpinan dan jajaran partai politik pengusung.

Selain itu, turut hadir pula jajaran Bawaslu Jabar dan stakeholder terkait lainnya.

Pengambilan undian nomor urut cagub dan cawagub Jabar 2024. Tahap pertama ialah pengambilan antrean undian nomor urut, dimulai dari pasangan calon yang mendaftar lebih dulu ke KPU Jabar.



Dengan mengucapkan bismillah rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 yang dilaksanakan Senin 23 September 2024 dengan ini resmi saya buka.”

Ummu Wahyuni
Ketua KPU Jabar

Setelah antrean nomor urut itu dibuka, barulah dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni pengambilan undian nomor urut. Pasangan cagub dan cawagub Jabar yang mendapat antrean pertama diberi kesempatan untuk mengambil undian lebih awal.

Pada akhirnya, pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan mendapatkan nomor urut 4, lalu pasangan Ahmad Syaikhul-Ilham Habibie nomor urut 3, pasangan Acep Adang-Gita KDI nomor urut 1, dan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja nomor urut 2.

“Berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ditetapkan nomor urut pasangan calon,” tegas Ummi.

Usai pengundian nomor urut, Ummi langsung mengajak pasangan cagub-cawagub Jabar 2024, itu menghadiri deklarasi damai di Laswi Heritage, Sealsa 24 September 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Jabar Adi Saputro mengatakan pihaknya secara khusus meminta para paslon untuk inovatif menampilkan budaya Jawa Barat dalam deklarasi damai.

Harapannya, lanjut Adi, Pilgub Jabar tidak hanya berjalan kondusif tetapi juga penuh kreativitas dalam menonjolkan budaya khas JJabar.

“Itu dicoba supaya ada, karena kita temanya inisiasi budaya, demokrasi,” ucapnya.

Sehari sebelumnya, atau Minggu 22 September 2024 malam WIB, KPU Jabar juga telah merampungkan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT),

Jumlah DPT di Jabar untuk Pilkada serentak 2024, khususnya pada Pilgub ditetapkan sebanyak 35.925.960 DPT.

Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni mengatakan, angka ini turun ketimbang data di Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang sebelumnya di 35.966.840 pemilih.

“Hari ini kita menetapkan untuk DPT tingkat provinsi. Barusan sudah ditetapkan. Dibandingkan DPS, kita turun sekitar 40.880,” ujar Ummi usai Rapat Pleno Penetapan DPT.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

PASLON DAN NOMOR URUT DI PILGUB JABAR 2024

**ACEP ADANG RUHIYAT
GITILIS DWI NATARINA**
Partai Pendukung
PKB

**JE JE WIRADINATA
RONAL SURAPRADJA**
Partai Pendukung
PDI Perjuangan

**AHMAD SYAIKHU
ILHAM HABIBIE**
Partai Pendukung
PKS
PPP
NasDem

**DEDI MULYADI
ERWAN SETIAWAN**
Partai Pendukung
Partai Gerindra
Partai Demokrat
Partai Golkar
PAN
PSI

Partai Non Parlemen yang Mendukung
PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Perindo, PKN, Partai Buruh

27 November 2024

PILGUB JABAR 2024
SEBAGAI INISIASI
BUDAYA DEMOKRASI



DPT yang telah ditetapkan tersebut lanjut dia, akan melakukan pemungutan suara di 73.862 tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan.

Penurunan angka DPT dari DPS ini kata dia, karena berdasarkan hasil pemutakhiran yang terus dilakukan terhadap data pemilih. Dimana data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), seperti meninggal, pindah domisili akhirnya digugurkan.

"Berkurangnya sebanyak 40 ribu, tersebar di 27 kabupaten/kota," ucapnya.

Meski angka DPT turun dari DPS, sejatinya jumlah pemilih lanjut Ummi naik ketimbang di Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Februari silam. Dimana pada Pemilu 2024 lalu, jumlah DPT di Jabar ada 35.714.901 pemilih.

Kenaikan sekitar 200 ribuan DPT ini kata dia, karena banyak pemilih pemula yang sudah masuk 17 tahun pada waktu pemungutan suara di 27 November mendatang.

Ini pun diakuinya tidak menutup kemungkinan bertambah, seiring ter-



jadinya perubahan jelang pelaksanaan pemungutan suara, antaranya bisa karena adanya pindahan domisili maupun meninggal dunia.

Penuh Warna, Penuh Drama

Jauh sebelum penetapan paslon dan nomor urut, drama terlebih dahulu

mewarnai proses penutupan pendaftaran paslon untuk Pilgub Jabar 2024, Kamis 29 Agustus 2024 lalu. Hingga detik-detik terakhir, jutaan mata yang menyaksikan melalui layar televisi tertuju ke Jalan Garut, Bandung, lokasi Kantor KPU Jabar berada.

Ratusan awak media bahkan



menunggu-nunggu hingga batas waktu pendaftaran itu tinggal hitungan menit saja. Wajah-wajah lelah tak bisa lagi mereka sembunyikan. Sejak pagi hari, bersama jajaran KPU Jabar, mereka menunggu satu persatu pasangan calon itu tiba untuk mendaftar.

“Tinggal sepuluh menitan lagi, satu paslon akan mendaftar. Calonnya masih gelap (belum jelas),” kata Yuliantono, salah seorang reporter dari media lokal di Bandung.

Malam itu suasananya memang tampak menegangkan. Apalagi hingga sekitar pukul 23.20, pasangan calon yang dimaksud belum juga datang. Ketua KPU beserta jajaran komisioner dan anggota sudah bersiap-siap di Aula untuk memberi sambutan.

Di pelataran parkir, para wartawan sibuk dengan panggilan telepon yang masuk. ‘Kantor sudah tanya-tanya, siapa calonnya, ini belum jelas juga’ lanjut Yuliantono.

Sebelum paslon yang terakhir ini, sudah ada tiga calon yang telah resmi

mendaftar ke KPU Jabar. Pertama pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan pada Selasa 27 Agustus sekitar pukul 15.30 WIB. Pasangan ini diusung 13 partai politik.

Selanjutnya pasangan Ahmad Syaikh dan Ilham Habibie yang mendaftar ke KPU pada Kamis 29 Agustus sekitar pukul 10.45 WIB. Mereka diantar para elite partai pengusung dari DPW, PKS Jabar, serta PPP.

Pasangan calon ketiga yang mendaftar adalah Acep Adang Ruhayat-Gitalis Dwi Natarina dari PKB sekitar pukul 21.30 WIB. Kompak mengenakan kemeja berwarna hijau, keduanya mendaftar dengan diantar sejumlah partisipan.

Maka, Tinggal satu calon lagi yang belakangan membuat proses pendaftaran ini menjadi begitu dramatis.

Arak-arakan itu akhirnya tiba di Kantor KPU sekitar pukul 23.35 WIB, atau tersisa sekitar 26 menit waktu pendaftaran ditutup. Tampak Ketua DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), Ono Surono berada paling depan yang seolah memberi pertanda dia yang maju sebagai Cagub. Disamping Ono, politikus PDIP Jabar Abdy Yuhana berjalan sejajar menuju Aula kantor KPU Jabar.

Spekulasi pun bermunculan. Obrolan-obrolan para reporter menyebut Ono Surono bakal maju didampingi Abdy Yuhana. Tapi beberapa menit kemudian, muncul nama Jeje Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran yang bakal mendampingi Ono. Sekilas terdengar perkataan seorang reporter di telepon, ‘Jangan ditulis dulu, belum jelas, tunggu saja.’

Dan pada akhirnya drama itu berakhir dengan sebuah kejutan. Ono Surono rupanya tak maju di Pilgub Jabar. Dia beserta para simpatisan yang datang hanya menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Jabar.

Dia pun memberi sambutan singkat yang isinya mempersilakan Cagub-Cawagub dari PDIP untuk tampil secara daring.

Rupanya, calon yang diusung PDIP, adalah Jeje Wiradinata sebagai Cagub dengan seniman ternama Ronal Surapradja Cawagubnya.

Mereka memberi pernyataan melalui daring. Sebuah hal baru dalam perhelatan kontestasi Pilkada tak hanya di Jabar tapi Indonesia.

Ketua KPU Jabar Umami Wahyuni mengatakan, pendaftaran melalui daring tidaklah melanggar aturan merujuk pada surat edaran terbaru dari KPU RI nomor 19, 15 poin ketiga, yang tertulis diperbolehkan ketika pasangan calon berhalangan hadir maka boleh memanfaatkan teknologi.

“Ini sudah dimanfaatkan oleh PDIP,” kata Umami.

Lebih Sengit Tanpa Incumbent

Pilgub Jabar 2024 akhirnya memantapkan persaingan antarpaslon tanpa adanya *incumbent* menyusul keputusan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta.

‘Menarik,’ ujar Pengamat Politik Ujang Komarudin.

Dinamika dalam persaingan politik dianggap Ujang hal yang biasa, termasuk pada perhelatan Pilgub Jabar kali ini.

“Lalu sekarang itu tidak ada incumbentnya baik calon gubernur maupun wakil gubernur, dari segi partai yang berkoalisi juga berubah-ubah tergantung dari dinamika yang berbeda setiap lima tahunan,” katanya.

Hanya saja, saat ini Ujang menilai masyarakat sudah lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Itu lantaran sumber informasi terkait seluruh paslon sangatlah mudah didapatkan.

“Lalu juga mungkin saat ini pemilihnya lebih intelek lebih cerdas,” tegasnya.

Ujang lantas mengungkap tantangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dalam setiap perhelatan politik termasuk Pilgub Jabar. Dia menyebut

ada kekhasan tersendiri soal pemilihan di Jabar.

“Kita punya kekhasan masyarakat sunda, masyarakat yang guyub, masyarakat yang senang bergotong royong, masyarakat yang sopan santun dalam berperilaku, dalam konteks pilihan ya masyarakat Jawa Barat ya pilihannya independen, masing-masing berdasarkan kepentingan masing-masing,” bebernya.

Terakhir, Ujang mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Dia menyebutnya tak sebatas pendidikan politik semata, melainkan sebuah tugas yang harus dituntaskan setiap warga negara.

“Hak pilih itu adalah hak yang harus ditunaikan, harus diperjuangkan, sama dengan hak-hak yang lain yang dimiliki oleh warga negara. Bukan hanya terkait pendidikan politik semata, tapi juga untuk sebagai bagian menjalankan tugas kewarganegaraan sebagai individu rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)





PILKADA RIANG GEMBIRA

BUKAN perkara enteng menghelat Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat. Jumlah pemilihnya, terbanyak seantero negeri. ‘Mari jadikan Pilkada Riang Gembira,’ kata Ummu Wahyuni.

Sari itu, Rabu 11 September 2024, air muka sang Ketua KPU Jabar begitu berseri-seri. Ada pengalaman baru yang dia rasakan selama 10 tahun bergelut di bidang penyelenggaraan pemilu. Sebuah inovasi baru bernama *Stand Up Comedy* Kepemiluan.

Stand Up Comedy, jadi satu dari sekian banyak usaha KPU Jabar untuk menarik minat masyarakat terkait segala hal tentang kepemiluan. Pada akhirnya, tujuan akhir berupa sebuah gerakan masyarakat untuk mengguna-

kan hak pilihnya.

Tema KPU Jabar sendiri adalah Gemilang (Gembira Memilih Langsung). Rupanya, tim KPU Jabar sadar butuh penerjemahan tepat dalam hal program-program yang digelar untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Setelah saya 10 tahun di KPU, baru kali ini kita mengadakan lomba seperti ini dengan mengundang komunitas *Stand Up* dan kita ingin sesuai dengan tema KPU Provinsi Jawa Barat hari ini ‘GEMILANG’ Gembira Memilih Langsung,” katanya.



Setelah saya 10 tahun di KPU, baru kali ini kita mengadakan lomba seperti ini.”

Ummu Wahyuni
Ketua KPU Jabar

Gembira Memilih Langsung juga seakan mengikis stigma banyak kalangan dimana Pilkada ataupun Pemilu merupakan sebuah kontestasi yang begitu menguras pikiran dan emosi. Terlebih, jika dikaitkan dengan persaingan politik yang melibatkan begitu banyak massa.

Dengan beberapa program sosialisasi yang digelar KPU Jabar salah satunya melalui *Stand Up Comedy*, Ummi berharap masyarakat benar-benar tergerak untuk menggunakan hak pilihnya.

Akan lebih bermakna pula, ketika mereka berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara pada 27 November mendatang dengan riang gembira tanpa adanya rasa keterpaksaan.

“Mari jadikan pelaksanaan demokrasi, pesta pilkada serentak kita di Jawa Barat dengan riang gembira, datang pada tanggal 27 November 2024 dengan riang gembira. Membawa seluruh sanak keluarga, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, untuk memilih pemimpin daerah masing-masing,” tuturnya.

Menyulap perhelatan Pilkada Serentak 2024 menjadi sebuah gelaran penuh keceriaan juga diharapkan jadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Berdasarkan rapat pleno, total DPS Jabar berada di angka sekitar 35,966 juta. Dengan perincian, jumlah pemilih laki-laki sekitar 18 juta, sedangkan perempuan sekitar 17 juta.

Dari jumlah nyaris menembus 40 juta pemilih tersebut, diperkirakan 21 persen diantaranya merupakan pemilih pemula. Atau, akan ada 7,5 juta pemilih baru di Jabar yang kudu digerakkan untuk menggunakan hak suaranya.

Terkait pemilih pemula di Jabar

yang sudah pasti diwakili kaum muda, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengeaskan Pilkada 2024 ini bukan semata urusan orang tua.

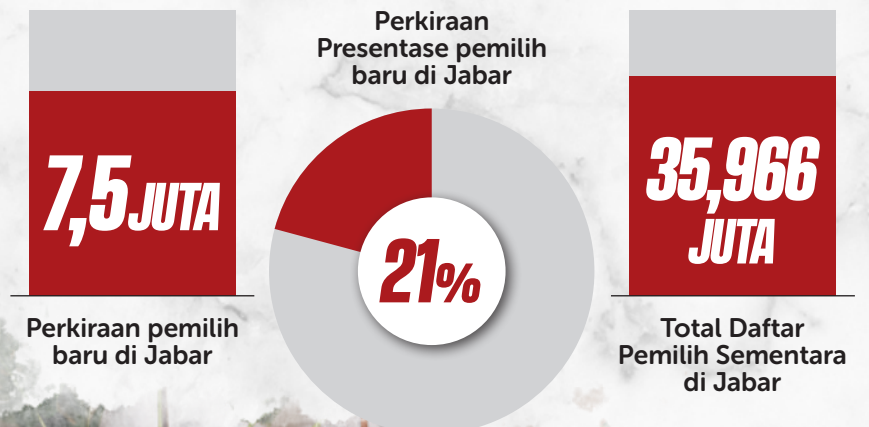
Dia berharap, generasi muda berpartisipasi aktif menyukseskan kontestasi memilih calon pemimpin di daerah yang mereka tempati.

“Kalau anak muda disebut ‘besok akan memimpin’ itu salah. Hari ini harus anak muda yang memimpin negara ini,” katanya.

Maka sekali lagi, tema menggelar Pilkada dengan Riang Gembira bisa berdampak efektif terhadap tingkat partisipasi kaum muda itu sendiri.

“Hidup itu harus ada ketawanya, pemilu itu juga sebagiannya harus kita ketawai. Maka kegiatan seperti ini bukan untuk mengecilkan persoalan, mari kita kelola peristiwa-peristiwa dengan riang gembira, yang Gemilang (Gembira Memilih Langsung). Ga boleh ada yang sedih, masa memilih sedih,” tandasnya. (*)

PEMILU DALAM ANGKA-ANGKA



INOVASI PENDIDIKAN PEMILIH



Menengok beberapa tahun ke belakang, rasanya mustahil sosialisasi kepemiluan berisi sebuah lawakan. Zaman telah berubah. Hati masyarakat bisa jadi tergerak ketika mereka tertawa riang.

KPU Jabar sukses menggelar *Stand Up Comedy* Kepemiluan di Kantor KPU Jabar, Bandung, Rabu 11 September 2024.

Ini jadi inovasi baru yang digelar KPU Jabar lantaran belum pernah sekalipun berlangsung pada perhelatan Pilkada Serentak sebelumnya.

Dikutip dari situs Britannica, pengertian *Stand Up Comedy* adalah

sebuah komedi yang dibawakan oleh seseorang, di mana orang tersebut berbicara langsung kepada penonton secara spontan.

Artinya, jenis komedi seperti ini dibawakan seorang komedian tunggal atau seorang diri atau baissa disebut monolog.

Pandji Pragiwaksono dalam bukunya berjudul *Merdeka dalam*

Bercanda (2012) menjelaskan bahwa kata ‘stand up’ memiliki makna yang berarti membela opininya.

Menurutnya, *Stand Up Comedy* mendorong seseorang melemparkan candaan yang berasal dari observasi atau analisis tentang keresahannya seorang diri di hadapan penonton.

Aldi Burik merupakan pemenang atau juara 1 *Stand Up Comedy* Kepemiluan yang dihelat KPU Jabar. Dia mengaku langsung tertarik berpartisipasi sejak pertama kali mengetahui gelaran ini bakal dilangsungkan.

“Temen saya yang udah *follow* instagram KPU Jawa Barat, dia nyebarin bahwa akan ada kompetisi Stand Up di KPU Jawa Barat,” ucap Aldi.

Aldi Burik dan kawan-kawannya langsung mengirimkan video untuk kemudian mengikuti babak kualifikasi sebelum terpilih maju ke babak Grand Final, 11 September 2024 lalu.

“Alhamdulillah di sini (*Grand Final*) juga rezekinya dan dapat juara,” katanya.

Aldi berharap, kegiatan ini akan terus berlanjut untuk menyuarakan kepemiluan yang dikemas dengan unsur komedi.

“Pokonya kegiatan lomba ini kalau bisa terus ada, karena bagian dari menyuarakan pemilu juga kita bisa dengan memeriahkannya dari komedi,” ungkapnya.

Salah satu dewan juri, Kamal Ocon mengatakan, orisinalitas dan penyampaian materi menjadi salah satu bahan penilaian dalam kontes ini.

“Ada beberapa penilaian dari juri seperti *Delivery* (penyampaian), orisinalitas materi dan pitch control. Ini durasi juga hanya 4 menit jadi para peserta juga harus disiplin dengan waktu,” ucap Kamal.

Selain itu, materi kontestan pun tidak boleh berpihak kepada salah satu calon atau partai politik tertentu.

“Materi juga ada peraturannya, tidak boleh yang menguntungkan salah satu calon atau partai, tidak boleh yang kasar, tidak boleh yang berbau pornografi,” ungkapnya. (*)



TAWA YANG MERANGKUL GENERASI MUDA

Salah satu tantangan yang selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu adalah merangkul para generasi muda untuk berpartisipasi aktif hingga mau menggunakan hak pilihnya.

Segala cara telah dilakukan selama ini terutama dengan program-program sosialisasi maupun berbagai penayangan iklan. Adakah kemungkinan yang lebih efektif?

Pendekatan humor rupanya ditempuh KPU Jabar dalam hal sosialisasi Pilkada Serentak 2024 dengan sasaran utama para kaum muda.

Para 19 September tahun lalu, seorang *Stand Up Comedy* Profesional bernama Christian Giacobbe menjadi narasumber sebuah seminar berkaitan dengan strategi komunikasi di Universi-

tas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali.

Dia memberikan sebuah fenomena menarik soal pemanfaatan humor dalam komunikasi publik dan pemasaran.

Kata dia, humor adalah sebuah jembatan kokoh dalam menjalin hubungan positif dengan audiens. Tak sebatas itu, humor telah mengatasi hambatan komunikasi, dan menjadikan pesan lebih melekat dalam ingatan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia pun yakin betul, kontes *Stand Up Comedy* Kepemiluan merupakan salah satu bentuk upaya efektif dalam merangkul generasi muda.

Selain urusan sosialisasi atau menegenalkan Pilkada Serentak Jabar 2024, *Stand Up Comedy* juga disebut Hedi Ardia sebagai strategi KPU Jabar memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

“Ini sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi kami berbicara dengan generasi muda lewat hal-hal yang ringan, humor,” ungkapnya.

Maka setelah sukses mengelat *Stand Up Comedy* Kepemiluan di KPU Jabar, Hedi memastikan kontes komedi tunggal ini juga akan diselenggarakan di

KPU tingkat daerah.

“Setelah KPU Jabar membuat kegiatan seperti ini, beberapa hari yang akan datang di semua KPU kabupaten/kota akan melakukan kegiatan serupa,” ucap Hedi.

Hedi pun mengajak para peserta yang telah mengikuti *Stand Up Comedy* Kepemiluan di tingkat provinsi untuk kembali mengikuti kontes seru di daerahnya masing-masing.

“Anggap saja ini pemanasan temen-temen karena di KPU kabupaten/kota akan melakukan kegiatan yang serupa. Mudah-mudahan bisa ikut meramaikan kegiatan di setiap kabupaten/kotanya masing-masing,” ujarnya.

Menurut Hedi, teknis penjurian peserta dan penjurian pun akan sama seperti yang telah dilakukan KPU Jabar.

“Kira-kira seperti yang provinsi lakukan, pengumuman untuk menjangir peserta sebanyak-banyaknya, memanfaatkan media sosial atau media apapun yang kiranya bisa menyebar luaskan informasi kegiatan ini,” jelas Hedi.

“Selanjutnya nanti diaudisi, lalu diambil 10 untuk masuk ke dalam Grand Final,” imbuhnya. (*)



SINERGI. Sekjen PWI Jabar Tantan Sulton Bukhawan (tengah) bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia (kanan) serta Ketua IJTI Jabar, Ikhwani Sabar Romli dan Orasi (Obrolan Santai Demokrasi) bertajuk 'Wartawan-KPU Bergandengan Tangan' di Nara Park Bandung, Jumat (6/9).

KONTESTASI HEBAT ITU SEMUA TERLIBAT

KALAU harus dipilih satu dari sekian banyak tolok ukur hebat atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, maka jawabannya: partisipasi.

KPU Jabar benar-benar menaruh fokus besar soal partisipasi masyarakat ketika kontestasi Pilkada Serentak 2024 berlangsung 27 November mendatang. Target tingkat partisipasi pemilih sebesar 75 persen pun dicanangkan.

Bagi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

KPU Jabar, Hedi Ardia, Pilkada Serentak 2024 adalah sebuah hajatan besar. Dia menegaskan, hajatan besar itu berlangsung hebat ketika semua pihak terlibat.

Tentu saja, tujuan utama yang hendak dicapai secara bersama-sama itu adalah tingkat partisipasi pemilih yang memenuhi target.

"Semuanya harus mengambil peran. Penyelenggara Pemilu dengan tupoksinya, kemudian pemerintah daerah juga dengan tugasnya, aparat keamanan dengan kewajibannya," ucap Hedi dalam acara Orasi (Obrolan Santai Demokrasi) bertajuk 'Wartawan-KPU Bergandengan Tangan, Ciptakan Pilkada Jabar Demokratis dan Aman' di Nara Park Bandung, Jumat 6 September 2024 lalu.

Terkait partisipasi pemilih, Hedi mengingatkan semua pihak bahwa

pengertian yang sesungguhnya bukanlah sekadar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos. Namun juga keterlibatan masyarakat secara aktif sejak awal hingga akhir tahapan pemilihan.

"Puncak dari demokrasi itu adalah partisipasi dan partisipasi ini bukan hanya sekedar nanti pemilih datang ke TPS. Tapi kita semua terutama rekan-rekan media memastikan bahwa KPU berjalan atau bekerja sesuai dengan aturan dan tahapannya tidak ada yang terlewat," katanya.

Insan pers disebut Hedi menjadi salah satu pilar penting di balik kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Tentu, ada kekhususan peran yang harus dimainkan secara maksimal oleh para insan wartawan.

"Rekan-rekan media adalah salah

satu pihak yang ikut menentukan sejauh mana informasi ini tersampaikan kepada publik, bahwa 27 November itu kita akan kembali datang ke TPS guna memilih gubernur dan memilih bupati atau wali kota sesuai dengan daerahnya masing-masing," tuturnya.

Menggendong para wartawan, KPU Jabar pun semakin percaya diri mematok target angka partisipasi sebesar 75 persen, atau meningkat dua persen dibandingkan Pilkada 2019 lalu.

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar, Tantan Sulthon meminta insan pers tetap bersikap kritis dalam mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat pada Pilkada 2024.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, kita harus bersikap. Misalkan sekarang Humas KPU memberikan rilis, terus kita tulis *copy paste* aja sesuai itu. Kita harus kritisi juga (rilis KPU), ini sesuai ga dengan kepentingan masyarakat," ucap Tantan.

Menurutnya, dengan mengedepankan sikap kritis tersebut maka masyarakat pun tidak akan mudah dibodohi oleh janji-janji manis para calon kepala daerah.

"Sehingga masyarakat tidak dibutakan dengan hanya sekedar lipstick, di Instagram bagus, di YouTube bagus, di media sosial bagus dan temen-temen media juga malah larut membungkus-bungkus," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jabar, Ikhwani Sabar Romli mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dan bertukar informasi.

Menurutnya, hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis TV. Sebab, tak sedikit informasi yang beredar di media sosial belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Kita flashback ke 20 tahun yang lalu, temen-temen televisi itu satu arah. Dimana audiens langsung ke televisi informasinya. Tapi eranya sekarang kompleksitasnya lebih tinggi, dimana kompleksitas itu hadir di semua lini, di ruang-ruang gelap itu hadir, baik itu



informasi yang benar maupun hoaks," kata Ikhwani.

Sehingga, hal itu menjadi tantangan sendiri bagi Ikhwani bagaimana menyuguhkan informasi khususnya terkait Pilkada 2024 yang berujung kepada meningkatnya angka partisipasi pemilih.

"Karena kompleksitas saat ini dengan hadirnya media sosial yang distribusi informasi cukup tinggi. Kompleksitas masyarakat tuh ikut terbawa juga, selain itu mungkin keberagaman," terangnya.

Pihaknya pun berpesan kepada peserta Pilkada 2024, agar dapat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya selama masa kontestasi.

"Terutama tim sukses, karena apa yang dilakukan oleh tim sukses itu dalam banyak hal berdampak di tingkat akar rumput. Jangan sampai masyarakat

ini menjadi terlibat konflik gara-gara kepentingan-kepentingan jangka pendek," tandasnya.

Peran Mahasiswa

Tak hanya media massa, KPU Jabar juga menggendong para mahasiswa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

KPU Jabar bekerja sama dengan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Jabar menggelar sosialisasi Pilkada 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/9).

Dihadiri 80 peserta, acara ini diharapkan melecut semangat bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam Pilkada 2024.

Kepada para mahasiswa, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia memberikan pandangan mengenai manfaat demokrasi.

“Demokrasi itu tidak hanya mahal tapi juga melelahkan karena kekuasaan itu tidak terkonsolidasi pada satu tangan. Dan hal ini yang terjadi sekarang,” ucap Hedi.

Namun demikian, kata Hedi, partisipasi rakyat adalah esensi dari demokrasi itu sendiri.

“Di sisi lain demokrasi itu kelebihannya adalah bahwa siapapun boleh berbicara, siapapun boleh menyatakan pendapatnya. Nah itu salah satu kelebihan dari demokrasi dimana partisipasi rakyat itu wajib partisipasi rakyat itu harus didengarkan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak mahasiswa Mapancas untuk berperan aktif dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di Jabar yang ditargetkan naik 2 persen dari Pilkada sebelumnya.

“Saya berharap mahasiswa Pancasila harus bisa mengambil peran agar angka partisipasi pemilih di Jawa Barat itu bisa naik. Kita targetkan angka partisipasi pemilih itu naik 2 persen kalau di Pilkada 2020 itu angka partisipasi

pemilih rata-rata itu 74 persen maka di 2024 ini kita harapkan naik 2 persen lah,” tuturnya.

“Walaupun naik 2 persen pun itu bukan perkara mudah apalagi dengan kondisi mood publik yang beberapa waktu lalu diwarnai dengan yang terjadi media sosial yaitu Kampanye Peringatan Darurat,” tambahnya.

Hedi juga berharap, Mapancas menggunakan hak pilihnya dengan bijak dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November nanti.

“Sekali lagi saya berharap betul lampu penyelenggara Pemilu bahwa angka partisipasi pemilih kita buat naik kemudian juga kita mendapatkan memang pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerahnya masing-masing itu saja yang dapat saya sampaikan,” harapnya.

Sementara itu, praktisi kepemiluan sekaligus senior Mapancas, Husni Farhani Mubarak menyoroti tantangan demokrasi saat ini, terutama pesimisme di kalangan kaum muda.

“Bonus demografi dan bonus demokrasi harus dimanfaatkan untuk

menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas tinggi,” ujar Husni.

Menurutnya, bonus demokrasi dalam konteks yang sama dengan bonus demografi adalah dimana jumlah pemilih pemula nanti data yang lebih depan.

“Pertanyaannya pada konteks yang sama adalah, apakah bonus demografi dan bonus demokrasi tersebut linier, sesuai dengan hasil akhir dari nasib bangsa ini,” ungkapnya.

Husni mengatakan, jika bonus demografi diharapkan menciptakan bangsa yang berdaya saing tinggi, sedangkan bonus demokrasi melahirkan demokrasi yang sehat, berkualitas tinggi dalam semua aspek penilaiannya.

“Kalau kita ukur, hari ini misalnya akan sangat subjektif, mau menyebut demokrasi sekarang sehat atau sah tergantung posisi kita. Karena kalau sudah bicara demokrasi, teman-teman tetapnya adalah politik,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Syaiful Bachri mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

“Peran mahasiswa bukan hanya



datang memilih, tapi juga mengawal proses Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Bagi Syaiful, pandangan tingkat partisipatif itu bukan hanya orang datang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan.

“Buat apa naik partisipasi publik, tapi di dalamnya ancur-ancuran gitu loh kecurangan tinggi, pelanggaran banyak, dan segala macamnya,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Bawaslu sendiri adalah untuk meminimalisir satu proses pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran, disitulah hadirnya Bawaslu dan masyarakat untuk mengawasi baik, lanjut partisipatif tentunya kita tahulah artinya yang berkaitan dengan menggambarkan sebuah pendekatan atau proses yang melibatkan partisipasi aktif,” katanya.

Kuncinya Netralitas dan Integritas

KPU Jabar terus menguatkan komitmen untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder di masa-masa krusial jelang gelaran Pilkada Serentak 2024. Ada pesan khusus dari Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

Rupanya, Bey ingin kembali menekankan soal integritas, netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu, termasuk seluruh elemen tim di KPU Jabar.

Hal itu dia katakan dalam gelaran

Rakor Pilkada Serentak 2024, Rabu 11 September 2024 lalu. Bey meminta KPU, Bawaslu serta jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinergi mewujudkan Pilkada Serentak 2024 di Jabar yang aman dan lancar.

Bey menyebut faktor-faktor yang dia yakini bakal membuat Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman, nyaman, serta sukses dari sisi penyelenggaraan.

Kata dia, kunci yang paling penting untuk dijalankan para penyelenggara adalah menjaga integritas, profesionalitas serta netralitas.

“Itu kuncinya dalam Pilkada tahun ini,” kata dia.

Berdasarkan data KPU Jabar, daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Barat mencapai 35,9 juta orang, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 73.000 titik.

Ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia, maka diperlukan perhatian khusus dalam hal logistik hingga pengamanan.

Hal itu direspons Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin yang menegaskan kesiapan Pilkada Serentak 2024 sudah sangat matang.

“Insyaallah, logistik dan semuanya siap, sudah kita proses semua,” ungkap Afifuddin.

Di sisi lain, Ketua KPU Jabar Umami Wahyuni menekankan, pentingnya komunikasi secara efektif yang dilakukan

oleh setiap sektor khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan.

Hal itu disampaikan Umami Wahyuni saat memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Semua kegiatan seharusnya semua itu mengetahui, bukan hanya pada lini sektor masing-masing kegiatan,” ucap Umami di Kantor KPU Jabar, Kamis (12/9).

Umami mengatakan, hal ini berdasarkan contoh kasus di beberapa daerah pada saat tahapan verifikasi administrasi.

“Divisi teknis atau ketua tidak tahu hari ini teman-temannya sedang ke mana? Nah ini kan menjadi sebuah potensi permasalahan, karena ketika nanti ada permasalahan yang dipermasalahkannya adalah kelembagaan bukan person to person,” katanya.

Oleh karena itu, Umami kembali menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. Mengingat, saat ini proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tengah memasuki tahapan-tahapan krusial.

“Hari ini teman-teman ketua dan seluruh anggota masih dalam proses verifikasi pencalonan berkas perbaikan, kabupaten/kota hari ini termasuk provinsi sedang melakukan verifikasi untuk perbaikan calon kepala daerah masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, Umami juga meminta agar rapat pleno di setiap sektor dilaksanakan setiap pekannya. Hal ini sebagai langkah evaluasi dan persiapan yang akan dilakukan ke depannya.

“Kami tidak ingin mendengar misalnya karena sibuknya hari ini sehingga kita tidak melakukan rapat pleno disektor masing-masing, ini jadi sebuah penegasan bagi para ketua bagaimana mengatur minimal 1 minggu sekali untuk kita melakukan rapat pleno,” katanya. (*)



KOTAK KOSONG DI CIAMIS



BERSAMA 37 daerah lainnya, Kabupaten Ciamis bakal jadi bagian dari sejarah baru perhelatan Pilkada Serentak. Yakni, realita pasangan calon tunggal vs kotak kosong.

Selasa, 17 September 2024 lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan untuk sementara ada 38 calon tunggal yang bakal berpotensi melawan kotak kosong untuk memenangi Pilkada.

Maka Pilkada serentak 2024 menjadi ajang kontestasi politik dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia.

Ini bukan sejarah yang diharapkan semua pihak dilihat dari kacamata persaingan politik. Calon tunggal, sudah disebut banyak pengamat sebagai sebuah kemunduran demokrasi.

Diketahui, Bapaslon tunggal di wilayah Kabupaten Ciamis ialah Herdiat Suryana dan Yana D Putra.

Pasangan ini diusung oleh koalisi

gemuk 15 partai politik antara lain, PKB, Gerindra, Golkar, PDIP, NasDem, Buruh, Gelora, PKS, PKN, PAN, PBB, Demokrat, Perindo, PPP serta partai Ummat.

Kekhawatiran muncul dari KPU Kabupaten Ciamis terkait tingkat partisipasi pemilih pada hari H pemungutan suara nanti.

Ketua KPU Ciamis Oong Ramdani mengatakan, kekhawatiran muncul karena ada anggapan dari masyarakat yang meyakini pasangan tunggal sudah pasti menang melawan kotak kosong.

“Sehingga masyarakat tidak datang ke TPS. Ya ada anggapan seperti itu. Sempat membuat kami khawatir,” katanya.

Oong memastikan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi masif ke berbagai lapisan masyarakat. Termasuk, sosialisasi yang saat ini tengah dilaku-

kan 27 PPK di Kabupaten Ciamis kepada masyarakat.

“Tanggung jawab sosialisasi bukan hanya KPU. Kerja kita kolaboratif, maka butuh kersjasama antar semua pihak, sehingga partisipasi pemilih bisa tinggi,” paparnya.

Oong menyebut tahapan Pilkada tetap berjalan sesuai aturan yang ada meski hanya ada satu paslon.

Dalam hal surat suara, Oong menegaskan takkan ada pengundian nomor. Nantinya, hanya ada gambar pasangan calon berdampingan dengan kotak kosong. Pemilihan seperti biasa dengan cara dicoblos.

“Tinggal pemilihan tata letaknya, apakah calon ingin di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau pilih sebelah kiri, maka di kanan kotak kosong dan begitu juga sebaliknya,” tegasnya.

Lalu soal debat paslon yang sudah pasti diganti dengan penyampaian visi dan misi sang paslon tunggal.

“Untuk penyampaian visi misi, apakah ada pendalaman atau seperti apa

kami menunggu regulasi,” ungkapny.

Oong juga menjelaskan, untuk jadwal kampanye dari tanggal 25 sampai dengan H-3 pelaksanaan pemilihan Pilbup Ciamis.

Pelaksanaan kampanye untuk satu pasang calon tersebut dilaksanakan full sesuai tahapan layaknya dengan beberapa calon.

“Kami mungkin akan menjadwalkan di mana saja, di titik mana saja termasuk juga pemasangan APK supaya tertib dan aman,” ucapnya.

KPU Ciamis pun mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Di TPS, masyarakat dapat memilih pasangan calon atau kotak kosong.

Tidak ada larangan yang mengajak untuk memilih kotak kosong. Tapi yang tidak boleh adalah menghalang-halangi pemilih datang ke TPS

“Yang tidak boleh itu adalah menghalang-halangi datang ke TPS. Silahkan datang mau pilih pasangan calon atau kotak kosong, itu pilihan. Kami tidak bisa menentukan pilihan itu yang penting datang ke TPS salurkan hak pilih,” pungkasnya.

Andai Paslon Tunggal Kalah

Pertanyaannya, andai kotak kosong yang menang, apa jadinya hasil pertaruhan di Pilkada itu?

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin dengan jelas menjawab, andai kotak kosong yang menang maka pihaknya mempersiapkan skema pemungutan suara kembali di tahun berikutnya, yakni 2025.

“Tahun depan kesepakatan kita di DPR RI Komisi II kemarin, kotak kosong yang menang maka pemilu akan dilaksanakan di tahun selanjutnya. Berapa bulan tahapannya? Nanti KPU akan lakukan simulasi, normalnya 11 bulan dari tahapan awal,” kata Afifudin.

Ia menyampaikan calon yang sebelumnya ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024, juga dapat kembali bersaing di pemilihan 2025.

“Calon itu bisa bersaing kembali, aturannya UU Pilkada. Penetapannya nanti di tanggal 22 September,” kata dia. Soal masa jabatan Kepala Daerah

FAKTA-FAKTA PASLON VS KOTAK KOSONG

TANPA PENGUNDIAN NOMOR

Hanya ada gambar calon tunggal berdampingan dengan kotak kosong.

GELARAN DEBAT DITIADAKAN

Diganti dengan penyampaian visi dan misi calon tunggal.

KAMPANYE TETAP SAMA

Pasang calon melaksanakan kampanye sesuai tahapan layaknya dengan beberapa calon.

ANDAI KOTAK KOSONG MENANG

KPU mempersiapkan skema pemungutan suara kembali di tahun depan, 2025.

PASLON YANG KALAH BISA IKUT LAGI

Calon yang sebelumnya ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024, juga dapat kembali bersaing di pemilihan 2025 sesuai UU Pilkada.

MASA JABATAN MELALUI PILKADA 2025

Apakah berlaku 4 tahun atau 5 tahun? Dalam hal ini pemerintah belum memutuskan.

terpilih lewat Pilkada lanjutan di tahun 2025, apakah berlaku lima tahun atau hanya empat tahun, ia menyatakan hal itu kewenangan pemerintah.

“Nanti, pasti akan ada perkembangan pembahasan karena ini kan situasi yang tak terduga. Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 soal keserentakan belum terduga. Yah, kita carikan jalan keluar yang terbaik,” ucapnya menambahkan.

Terkait aksi mengkampanyekan kotak kosong, Afifudin tidak mempersoalkan hal tersebut, selagi masyarakat tidak mengajak masyarakat untuk golput (tidak menggunakan hak pilih).

“Yang penting jangan sampai mengkampanyekan orang tidak menggunakan hak pilihnya. KPU tidak akan memfasilitasi kampanye kotak kosong. Soal pilihan itu hak, kotak kosong untuk yang tidak setuju dengan calon yang ada,” ujar dia.

Satu-satunya di Jabar

Ketua KPU Provinsi Jabar Ummi Wahyuni menegaskan, dari 27 kabupaten/kota se-Jabar hanya Pilbup Ciamis 2024 yang cuma diikuti satu bakal pasangan calon.

Sehingga dipastikan di Pilbup Ciamis 2024, Herdiat Sunarya-Yana D Putra akan bertarung melawan kotak kosong.

“Satu (daerah). Calon tunggal di Ciamis,” kata Ummi di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kamis 5 September 2024.

Pasangan Herdiat Sunarya-Yana D Putra adalah petahana yang didukung 15 partai politik yaitu PKB, Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, PAN, PBB, Demokrat, Perindo, PPP dan Partai Ummat.

Hanya tiga partai yang tidak ambil bagian dalam Pilbup Ciamis 2024 yakni Hanura, PSI, dan Partai Prima.

Sejatinnya, dalam Pemilu 2024 ada 24 partai yang turut serta. Namun secara nasional, hanya 18 partai karena enam parpol lainnya merupakan partai lokal yang berkontestasi di Provinsi Aceh.

Ummi menambahkan bahwa bakal ada regulasi khusus soal desain surat suara untuk pasangan tunggal lawan kotak kosong.

Dia mengatakan KPU RI saat ini tengah mempersiapkan regulasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pasangan tunggal.

“KPU RI sedang melakukan penyesuaian terkait itu, bahkan nanti bakal ada beberapa regulasi yang khusus terkait dengan pasangan tunggal,” jelas dia.

Saat ditanya apakah nanti surat suara hanya akan berisi 1 gambar pasangan tunggal, Ummi kembali mengatakan pihaknya belum bisa memastikan.

“Belum, belum. Kan 2 pastinya. Karena kan satunya kosong satunya lagi [bergambar]. Karena kan pengalaman di Tasikmalaya juga gitu,” kata dia.

“Tapi kita tunggu update regulasi dari KPU RI,” tandasnya. (*)



MAKNA SILI DAN WANGI

MASKOT Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 adalah Sili dan Wangi. Didapat melalui rangkaian proses sayembara yang digelar KPU Jabar. Apa maknanya?

Sili dan Wangi telah diluncurkan sebagai Maskot resmi Pilgub Jabar bersamaan dengan pengenalan tagline serta jingle hajatan akbar, itu di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Senin 27 Mei 2024 lalu.

“Ini perpaduan Siliwangi dan Harimau Bara asli Jabar,” terang Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni.

Sili dan Wangi adalah sepasang harimau. Sili yang jantan sementara

Wangi adalah si betina. Desainnya adalah perpaduan harimau loreng dengan sentuhan beberapa atribut khas Jawa Barat.

Seperti ikat kepala dengan logo kundang khas Jabar. Termasuk kalung dan ikat pinggangnya yang khas.

“Ini menunjukkan kegagahan, kekuatan dan keramah tamahan Jabar,” sambung Ummi.

Sementara nama Sili dan Wangi atau Siliwangi tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Jabar. Tokoh legendaris Jabar dan kini juga melekat pada Kodam III di Jabar.

Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia menambahkan, dalam visualnya, Sili dan Wangi memakai pakaian tradisional Sunda khas Jabar dengan logo KPU dan iket Sunda dengan pin Kujang.

Sili dan Wangi juga mengenakan kalung perak hiasan tradisional Sunda

yang menggambarkan kekayaan budaya dan seni tradisional yang dimiliki masyarakat Jabar.

Secara umum, kendati Bara merupakan seekor harimau yang dikenal sebagai hewan buas namun Sili dan Wangi digambarkan dengan harimau lucu dan ceria.

Keduanya juga memegang paku sebagai simbol alat untuk mencoblos surat suara yang melambangkan keramahan dan semangat untuk mengajak masyarakat melaksanakan pemilihan umum.

Di sisi lain usut punya usut, maskot tersebut merupakan karya Eman Sulaelman, guru Informatika SMAN 1 Leuwiliang. Eman mengaku tak menyangka bisa memenangkan sayembara desain maskot yang digelar KPU Jabar.

Dia pun menuturkan proses pembuatan desain maskot Sili dan Wangi yang menurutnya susah-susah gampang.

Setelah beberapa hari benaknya bergelut dengan banyak pilihan nama,

‘wangsit’ itu pun akhirnya turun.

“Tiga harian baru ketemu Sili dan Wangi,” jelasnya.

Sebelumnya, Eman sempat berpikir untuk membuat Kang Sate, maskot yang menggambarkan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jabar. Tetapi pada akhirnya, hatinya lebih condong untuk memilih Sili dan Wangi.

Sili dan Wangi buah karya Eman telah mengalahkan 75 karya maskot lain yang juga masuk sayembara. Kemenangan Eman sangatlah bernilai, lantaran dewan juri sayembara bukanlah orang sembarangan melainkan profesional di bidangnya macam Prof Nina akademisi dari Unpad, Budayawan Wawan Gunawan hingga akademisi ITB Andi Hakim.

Gembira Memilih Langsung

Tak hanya mascot, KPU Jabar juga telah menentukan tema dan tagline untuk Pilgub Jabar 2024 yang masuk salah satu rangkaian Pilkada Serentak 2024. Lagi-lagi, nilai-nilai budaya yang dikedepakan.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengungkapkan tema Pilgub Jabar 2024 adalah inisiasi budaya demokrasi dalam tagline GemiLang (Gembira Memilih Langsung).



Menurut Ummi, tema inisiasi budaya dalam kontestasi Pilgub Jabar lantaran ingin kembali mengingatkan masyarakat untuk terus mengingat dan mengimplementasikan beraneka ragam nilai-nilai dalam budaya kedaerahan.

Ummi lalu teringat sepenggal kata dari Bung Hatta mengatakan jika Pemilu bukan hanya soal pemilihan dan kotak suara tetapi ada budaya dan etika yang harus diterapkan dalam proses tahapan pemilihan.

“Kenapa inisiasi budaya, mengembalikan keanekaragaman budaya yang ada di Jabar, mengingatkan kita pada proses pemilihan kalau budaya Jabar itu

adalah silih asah, silih asuh, silih asih dan kita mengembalikan kalau Bung Hatta itu mengatakan Pemilu bukan sekedar pemilihan dan kotak suara,” ujarnya.

Bagi Ummi pesta demokrasi dan nilai-nilai budaya sangat sejalan lurus lantaran di sana ada rasa dan sikap saling menghormati segala perbedaan yang ada.

“Kita ingin mengembalikan ke sana,” lanjut Ummi.

Sementara untuk tagline GemiLang, Ummi menuturkan, KPU Jabar ingin seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan kegembiraan dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang itu.

“Kenapa gembira dan memilih langsung, kita ingin Pilkada di Jabar dapat berjalan gembira untuk semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Dengan kegembiraan menyambut pesta demokrasi daerah, Ummi memastikan KPU Jabar kian bersemangat mengelola jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia. Dia menegaskan, tanpa sinergi semua maka akan sulit menggelar kontestasi politik yang sesuai harapan.

Sebagai contoh, Ummi mengungkapkan tingkat partisipasi pemilu 2024 di Jabar naik dibanding 2019. Angka partisipasi di tahun 2024 adalah 82,3 sebelumnya 79,8 persen di 2019.

“Haturan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kami juga memohon sinergi dan support dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” kata Ummi. (*)



MENGIKIS APATISME

KAUM muda jadi kekuatan besar untuk mengikis apatisme politik. Merekalah pioner hebat dalam menyampaikan satu pesan penting: hak suara wajib ditunaikan!



Semangat itu pun terpancar dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk Meningkatkan Kesadaran Poitik dan Partisipasi Generasi Muda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Barat 2024 di Hotel Karasak Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa (17/9) lalu.

Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Bandung (IPMAKAB) dengan membahas isu-isu strategis terkait peran pemilih muda dalam perhelatan Pilkada.

Ketua PP IPMAKAB, Pijar Maulid, menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik, terutama menjelang Pilkada.

Menurutnya, mahasiswa dan pelajar harus menghindari apatisme politik dan memahami bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dari proses politik memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Ia mengajak peserta untuk cermat dalam memilih calon pemimpin, dengan menelaah visi dan misi para kandidat.

“Jangan hanya memilih karena kedekatan personal atau popularitas, tapi lihat program-program mereka untuk lima tahun ke depan,” kata Pijar.

Pijar juga menyinggung fenomena golput (golongan putih), yang muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan. Ia menyampaikan, meski ia sendiri pernah golput, ia menyadari bahwa sikap apatis hanya akan memperburuk situasi.

Terkait acara, sesi pertama penyampaian materi disampaikan oleh Ade Irpan Al-Anshory, yang membahas peran dan tantangan mahasiswa dalam Pilkada Provinsi Jabar.

Ade menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen

perubahan dan pelopor demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijalankan secara demokratis dan langsung oleh masyarakat.

Ade juga mengingatkan peserta bahwa pemilih yang cerdas adalah mereka yang mampu menilai calon berdasarkan visi, misi dan rekam jejak mereka, bukan hanya karena faktor emosional atau kedekatan personal.

“Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus menjadi pelopor dalam menyebarkan pendidikan politik kepada masyarakat, agar proses pemilu berjalan dengan kualitas yang baik,” ungkap Ade.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Didi Komarudin, yang membahas peran masyarakat dalam Pilkada 2024 dan bagaimana aturan kampanye harus dipahami oleh pemilih muda.

Didi menjelaskan bahwa kampanye adalah bagian dari proses demokrasi yang diatur secara ketat, termasuk soal pemberian barang-barang kampanye yang diperbolehkan dalam aturan KPU.

Selain itu, Didi menekankan bahwa politik uang masih menjadi tantangan serius yang merusak integritas Pilkada, dan generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menolak praktik tersebut.

“Jadilah pemilih yang cerdas dan kritis. Sebagai mahasiswa, kita harus berperan aktif dalam menjaga demokrasi, termasuk melalui pemantauan proses Pilkada,” ujar Didi.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber dan foto bersama, diiringi doa penutup dan ajakan kepada seluruh peserta untuk terus memantau perkembangan Pilkada melalui media sosial resmi KPU Jabar. Sebagai tanda apresiasi, peserta juga menerima uang transportasi dan konsumsi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta yang merupakan pelajar dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada 2024, dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. (*)



PROVINSI Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Ada satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar dan 27 Pemilihan Wali Kota-Wakil Walikota dan Bupati-Wakil Bupati secara serentak pada bulan November mendatang.

Oleh: Ummi Wahyuni
Ketua KPU Jabar

Pilkada Serentak ini baru pertama kali digelar setelah sebelumnya perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sukses digelar dan melahirkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan anggota DPD, DPRD serta DPR RI.

Kompleksitas Pilkada Serentak menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyukseskan pilkada dengan angka partisipasi pemilih yang meningkat.

Provinsi Jabar dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kurang lebih 35 juta jiwa menjadikan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah DPT terbanyak.

Sehingga, kompleksitas permasalahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain provinsi dengan jumlah DPT terbanyak, Jabar juga mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Sehingga, diperlukan sinergitas yang kuat untuk menyukseskan pilkada sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Sinergitas yang kuat antara KPU Jabar dengan KPU di kabupaten/kota harus terus dilakukan selama pemilu berlangsung. Dengan komisioner yang hanya berjumlah 7 orang ini, KPU Jabar dituntut untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder kepemiluan.

Soliditas 7 orang komisioner yang

mengisi struktur lengkap KPU Jabar mulai dari Ketua, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat,

Divisi Informasi dan Data, Divisi Perencanaan dan Logistik, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan harus dibangun sebagai modal dalam memimpin dan menyelenggarakan perhelatan demokrasi lima tahunan ini.

Sehingga soliditas kelembagaan adalah hal paling utama untuk menyukseskan Pilkada 2024 dan dengan dukungan 27 kabupaten/kota, pemilu akan berjalan lancar dan sukses.

KPU Jabar menargetkan angka partisipasi pemilih meningkat di Pilkada 2024 ini. Jika dalam Pilkada 2018 sekitar 74 persen, maka Pilkada 2024 angka partisipasi pemilih ditargetkan melebihi 75 persen. Target ini dilihat dari berbagai kompleksitas Jabar sebagai daerah dengan jumlah DPT terbesar dan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.

Akan tetapi, dengan soliditas para komisioner KPU Jabar dan sinergitas KPU kabupaten/kota, target partisipasi pemilih akan tercapai dan hasil pilkada serentak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Sebagai provinsi yang kaya dengan nilai-nilai budaya, KPU Jabar memperkenalkan jargon “Gemilang” (Gembira Memilih Langsung) sebagai tagline dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Jabar memiliki beraneka ragam budaya yang harus tetap diingat dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga inisiasi budaya harus menjadi ruh dalam perhelatan demokrasi hari ini.

Seperti yang pernah diungkapkan Bung Hatta yang mengatakan bahwa jika pemilu bukan hanya soal pemilihan dan kotak suara. Lebih dari itu, ada budaya dan etika yang harus diterapkan dalam proses tahapan pemilihan.

Dengan tagline Gemilang ini juga, KPU Jabar akan berupaya menciptakan pilkada yang riang gembira dan menghasilkan pemimpin sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. (*)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Gemilang
#GembiraMemilihLangsung

27
November
2024

KATAKAN **TIDAK** UNTUK **GOLPUT!**



Setiap Suara Sangat Berarti.
Suaramu menentukan daerahmu.



Pilkada adalah Hak Kita.

Mari gunakan hak
untuk masa depan
yang lebih baik.

Semakin banyak
yang memilih,
**semakin kuat
suara rakyat.**



jabar.kpu.go.id



[kuprovincijabar](https://www.instagram.com/kuprovinsijabar)



[KpuProvJabar](https://www.facebook.com/KpuProvJabar)



[kpu_provjabar](https://twitter.com/kpu_provjabar)



[KPU Provinsi Jawa Barat](https://www.youtube.com/KPUProvinsiJawaBarat)